



ရလဒ်ကို ဂျပာပိတိုက် ဂျပာပိတိုက် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (ပိဏ်တိုက်)

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)

ရလဒ်ကို ဂျပာပိတိုက် ဂျပာပိတိုက် အဖွဲ့အစည်း

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: [inspektorat@baliprov.go.id](mailto:inspektorat@baliprov.go.id) WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

## LAPORAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2021

### I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/04/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan



dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 1330/02-B/HK/2015 tentang Wajib Laporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## II. TUJUAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang diawali dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menjadi wajib lapor LHKPN melaporkan perubahan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) menggunakan SIHARKA (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## III. WAJIB LAPOR

Menetapkan wajib lapor LHKASN kepada seluruh ASN selain wajib lapor LHKPN.

## IV. REKAPITULASI DAN TATACARA PELAPORAN PERTAHUN

- Pada Tahun 2011-2016 masih menggunakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dimulai pada tahun 2017, sebagai tahap pengenalan LHKASN menggunakan SIHARKA pelaporan diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali yang sudah melaporkan LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan Januari sampai pertengahan bulan Desember tahun 2017 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

<b>Jumlah</b>	
<b>Sudah Melapor (org)</b>	<b>Belum Melapor (org)</b>
<b>11.414</b>	<b>1.246</b>



3. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 terdapat perubahan kriteria wajib lapor dan periode pelaporan menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu pada poin 2 yang menyebutkan bahwa:

- Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
  1. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
  2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat: 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Dilatarbelakangi dari aturan tersebut dan berdasarkan hasil pendampingan dari tim LHKASN Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 5 April 2018 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali maka pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA pada tahun 2018 diwajibkan khusus bagi ASN (diluar anggota LHKPN) yang mengalami periode Promosi , Mutasi dan Pensiun.

Rekapitulasi pelaporan LHKASN pada tahun 2018 sebagai berikut :

<b>Jumlah ASN Prov.Bali th 2018</b>	<b>Peserta LHKASN th 2018</b>	<b>Wajib Lapor LHKASN th 2018</b>	<b>Status</b>	
			<b>Sudah Melapor LHKASN</b>	<b>Belum Melapor LHKASN</b>
<b>11.318</b>	<b>11.104</b>	<b>1.452</b>	<b>270</b>	<b>1.181</b>

Keterangan :

- Rendahnya jumlah pelaporan LHKASN pada tahun 2018 disikapi secara langsung oleh Inspektorat Provinsi Bali dengan melakukan konsultasi kepada admin LHKASN pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Terdapat beberapa masukan dan rekomendasi yang diberikan yaitu:
  1. Pihak Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mengapresiasi proses input data LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang langsung diimplementasikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



2. Mengenai periode pelaporan LHKASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat menyesuaikan sesuai kebijakan masing-masing daerah, namun pada dasarnya konsep pelaporan LHKASN dibuat dan dilaksanakan apabila ASN mengalami perubahan harta kekayaannya. Dapat diartikan bahwa ASN bersangkutan yang bertanggungjawab penuh terhadap proses pelaporan harta kekayaannya masing-masing. Apabila tidak melapor dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan.
3. Inspektorat selaku APIP di daerah bertanggungjawab pada pemberian username dan password SIHARKA kepada seluruh wajib lapor LHKASN serta proses rekapitulasi dan verifikasi pelaporan pertahun.
4. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali wajib lapor LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan januari sampai akhir bulan Desember tahun 2019 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

<b>Jumlah ASN Prov.Bali th 2019</b>	<b>Peserta LHKASN th 2019</b>	<b>Status</b>		<b>Persentase Pelaporan LHKASN th 2019</b>
		<b>Sudah Melapor LHKASN th 2019</b>	<b>Belum Melapor LHKASN th 2019</b>	
<b>11.516</b>	<b>11.172</b>	<b>10.138</b>	<b>1.034</b>	<b>90,7%</b>

5. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2019), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

<b>Jumlah ASN Prov.Bali th 2020</b>	<b>Wajib Lapor LHKASN th 2020</b>	<b>Status</b>		<b>Persentase Pelaporan LHKASN th 2020</b>
		<b>Sudah Melapor LHKASN th 2020</b>	<b>Belum Melapor LHKASN th 2020</b>	
<b>10.968</b>	<b>10.620</b>	<b>10.408</b>	<b>210</b>	<b>98%</b>



6. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2020), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2021 *	Wajib Lapor LHKASN th 2021	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2021
		Sudah Melapor LHKASN th 2021	Belum Melapor LHKASN th 2021	
10.951	10.658	10.658	0	100%

(\* Sumber database kepegawaian oleh BKD Provinsi Bali per 16 Maret 2021)



Bali, 6 Januari 2022

INSPEKTUR

I WAYAN SUGIADA

NIP. 19651231 198603 1 175



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE